

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
SENTRA INDUSTRI KONVEKSI DAN BORDIR DI DESA PADURENAN,  
KECAMATAN GEBOG, KABUPATEN KUDUS**

Oleh:

Definta Aliffiana, Nina Widowati

**Departemen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Usaha mempercepat pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran, salah satunya dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah yang terwakili oleh Dinas Perindustrian, Koperasi dan, UKM Kabupaten Kudus dalam melakukan pemberdayaan sudah berhasil, namun belum maksimal, karena dari beberapa indikator keberhasilan pemberdayaan masih ada yang belum bisa diberikan oleh pemerintah yaitu mengenai pemberian bantuan dana sebagai modal usaha untuk para pelaku usaha UMKM konveksi dan border. Rekomendasi berdasarkan penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah agar membantu mencarikan bantuan dana kepada pihak swasta lainnya yang ada di Kabupaten Kudus atau di luar Kabupaten Kudus.

**Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Pemberdayaan, UMKM**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi

tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah.

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan

pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang dapat berkembang pesat melalui kemajuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat, Desa Padurenan di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus merupakan desa yang mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Desa Produktif karena terdapat banyak UMKM masyarakat di desa tersebut khususnya di bidang konveksi dan bordir.

Di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha

Kecil, dan Menengah Kabupaten Kudus bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif Koperasi dan UMKM menjadi prioritas, mengingat peran yang sangat besar bagi penyerapan tenaga kerja dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan, permodalan dan sumber daya manusia pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta akses pasar produk UMKM, dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi maka perekonomian akan semakin tumbuh.

Berbagai permasalahan dalam pemberdayaan UMKM adalah rendahnya kemampuan sumber daya manusia, terbatasnya penguasaan dan pemilikan aset produksi terutama permodalan, konsentrasi pekerjaan sumber daya yang bergerak pada usaha yang turun temurun, dan rendahnya penguasaan teknologi proses produksi dan informasi pemasaran. Melalui optimalisasi peranan beberapa lembaga pendamping untuk memperkuat peranan UMKM dan koperasi, penciptaan semangat kewirausahaan dan pengembangan

pemasaran produk diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM tersebut, sehingga peneliti tertarik mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Administrasi Publik**

Administrasi Publik menurut Nigro & Nigro: “Administrasi Publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara yang meliputi ketiga cabang yaitu eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR), yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antar ketiganya yang mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik.” (dalam Syafri, 2012: 20)

Rosenbloom and Goldavan mendefinisikan bahwa: “Administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian

masyarakat.” (dalam Syafri, 2012: 20)

Woodrow Wilson mendefinisikan: “Administrasi Publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat, dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/ swasta.” (dalam Syafri, 2012: 21)

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan hal-hal yang berkaitan dengan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk penyelenggaraan negara.

## **2. Manajemen Publik**

Manajemen publik adalah sebuah studi yang mempelajari cara mengelola proses pelaksanaan organisasi publik yang umumnya

mengarah pada perbaikan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakatnya.

Overman dalam Pasolong (2007:83) manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik mengemukakan perkembangan manajemen publik dipengaruhi oleh beberapa pandangan, diantaranya:

1. Manajemen Normatif
2. Manajemen Deskriptif
3. Manajemen Stratejik
4. Manajemen Publik
5. Manajemen Kinerja

## **3. Pemberdayaan**

Menurut Sumodiningrat (1999) (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:47), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun

pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Di dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

#### **4. Indikator Pemberdayaan**

Menurut Sunyoto Usman (2004:21) keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, yaitu:

1. Bantuan dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat
3. Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil

produksi barang dan jasa masyarakat

4. Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat
5. Penguatan kelembagaan kepada masyarakat

#### **5. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM saat ini sebagian besar usahanya bersifat perorangan dan keberadaan UMKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang teroganisir. Di dalam memahami permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman mengenai karakteristik Usaha Kecil. Karakteristik tersebut, sebagai berikut (Anoraga dan Sudantoko, 2002:225):

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

3. Modal terbatas.
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekankan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standard an harus terapan.

#### **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif karena metode kualitatif digunakan untuk memahami makna-makna secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih oleh penulis karena penelitian ini akan mengeksplorasi untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan yang

mendalam mengenai kenyataan atau fakta yang relevan terkait upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kondisi pemberdayaan pelaku usaha UMKM konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Saat ini industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan terus berkembang dan meningkat untuk produksinya, karena setelah dicanangkan sebagai Desa Produktif, Desa Padurenan menjadi terkenal oleh masyarakat luar. Keberhasilan dalam maju pesatnya industri konveksi dan bordir tersebut tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan Desa Padurenan sebagai klaster konveksi dan bordir.

##### **a. Bantuan Dana Sebagai Modal Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Desa

Padurenan adalah salah satu desa yang mempunyai banyak umkm konveksi dan bordir, serta menjadi sentra industri klaster konveksi dan bordir. Di dalam pelaksanaan kegiatan industri tersebut para pelaku usaha membutuhkan modal usaha untuk keberlangsungan produksi, tetapi dari pemerintah daerah tidak dapat memberikan banyak bantuan modal dana usaha karena terlalu besar dana untuk produksi konveksi dan bordir serta berkaitan dengan tanggungan dan resiko yang sangat besar. Pemerintah daerah membantu lewat KSU (Koperasi Serba Usaha) untuk memfasilitasi para pengusaha industri konveksi dan bordir yang ada di Desa Padurenan.

#### **b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat**

Sarana bagi pelaku usaha industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan saat ini yaitu adanya Koperasi Serba Usaha (KSU) Padurenan Jaya, dengan adanya koperasi tersebut dapat membantu para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Koperasi tersebut

menyediakan bahan baku dan bahan pendukung yang dibutuhkan oleh para pengusaha industri konveksi dan bordir yang tidak jauh dari tempat tinggal produksi mereka. Banyaknya bahan baku dan bahan pendukung di KSU Padurenan Jaya, membantu pelaku usaha industri konveksi dan bordir tidak harus bepergian jauh untuk mendapatkan bahan baku dan bahan penunjang. Hal tersebut dapat menghemat biaya transportasi dalam memperoleh bahan baku, sehingga sarana koperasi tersebut dapat mengembangkan ekonomi masyarakat pelaku usaha industri konveksi dan bordir

Selain sarana yang mendukung, prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung dalam mengembangkan klaster industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yaitu dengan adanya pembangunan jalan, atau pembangunan lingkungan di desa, dan membangun tugu identitas yang menyangkut prasarana untuk mendukung Desa Klaster

konveksi dan bordir di Desa Padurenan.

**c. Penyedia Sarana untuk Memperlancar Pemasaran Hasil Produksi**

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait UMKM yaitu ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran hasil produksi. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk melakukan pengenalan produk UMKM kepada masyarakat luar Kabupaten Kudus, salah satunya bekerjasama dengan Telkom Kudus terkait pemasaran *online*, langkah ini dilakukan agar para pelaku usaha industri konveksi dan bordir dapat mempromosikan hasil produksi dari luar daerah yang belum terjangkau.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus juga mengadakan pameran produk UMKM yang ada di Kudus

setiap tahunnya, salah satunya industri konveksi dan bordir.

**d. Penguatan Kelembagaan Sosial, Ekonomi Masyarakat**

Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan suatu usaha kecil dan memberikan peluang untuk pihak swasta dalam membantu terlibat dalam pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan. Pemerintah daerah dalam hal ini yang mengelola perkembangan industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan adalah Kopersi Serba Usaha (KSU) Padurenan Jaya yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah yaitu Bank Indonesia, Bank BPD Jateng, Telkom Kudus dan pihak swasta lainnya yang ikut membantu dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

**e. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir di

Desa Padurenan yang dalam hal ini peran pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus telah melakukan pemberdayaan dalam mengembangkan sumber daya manusia kepada pengusaha kecil khususnya industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, dengan adanya pelatihan dan pembinaan untuk para pelaku usaha, program dari pemerintah tersebut dapat membantu untuk mengembangkan sumber daya manusia, dulu pernah diadakan pelatihan tingkat nasional yaitu didatangkan desainer Ramli dan pakar bordir dari Jawa Barat yaitu Hery Suhersono, untuk meningkatkan SDM pengusaha bordir. Selain adanya pelatihan, juga dilakukan pembinaan pembukuan sederhana, pembinaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas UMKM.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Upaya

Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus” bahwa industri tersebut merupakan usaha perorangan yang mengandalkan modal milik pribadi dengan jumlah yang sangat terbatas.

Kondisi pemberdayaan UMKM Sentra Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus., sudah dapat dikatakan baik tapi belum sepenuhnya mendukung, beberapa hal yang mendukung yaitu:

- a. Bantuan sarana dan prasarana pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan adanya KSU (Koperasi Serba Usaha) dapat membantu memenuhi kebutuhan para pelaku usaha konveksi dan bordir untuk mempermudah mendapatkan bahan baku, bantuan pembangunan jalan, dan membangun tugu identitas untuk dapat mendukung UMKM sentra industri konveksi dan bordir di Desa Padurenan.

- b. Penyedia sarana untuk memperlancar hasil produksi, dengan mengikutsertakan para pelaku usaha dalam pameran yang memperkenalkan hasil produksinya dan ada juga bantuan pemasaran lewat *online* untuk memperluas jangkauan pemasaran, sehingga produk konveksi dan bordir tidak hanya dikenal dalam lingkup Kabupaten Kudus.
- c. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, untuk mengembangkan usaha konveksi dan bordir Desa Padurenan, pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta untuk ikut membantu dalam mendukung pengembangan usaha konveksi dan bordir di Desa Padurenan, seperti Bank Indonesia, Bank BPD Jateng, Telkom Kudus, serta adanya bantuan lewat Koperasi Serba Usaha (KSU) Padurenan Jaya.
- d. Pengembangan sumber daya manusia, pemerintah memberikan bantuan pelatihan dan pembinaan serta adanya sosialisasi untuk

mendukung kualitas sumber daya manusia.

Beberapa hal yang mendukung di atas, ada salah satu hal yang menghambat dalam keberhasilan pemberdayaan yaitu mengenai modal usaha, Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan bantuan modal dana usaha karena terlalu besar dana untuk produksi konveksi dan bordir serta berkaitan dengan tanggungan dan resiko yang sangat besar.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk Pemerintah Daerah dan masyarakat pelaku usaha konveksi dan bordir Desa Padurenan untuk keberhasilan pemberdayaan, bahwa salah satu hal yang menghambat keberhasilan pemberdayaan UMKM sentra industri konveksi dan bordir mengenai modal usaha, perlu adanya dukungan anggaran dana mengenai modal usaha untuk para pelaku usaha konveksi dan bordir dari pemerintah untuk pengembangan UMKM industri konveksi dan bordir Desa

Padurenan, dengan membantu mencari bantuan dana kepada pihak swasta lainnya yang ada di Kabupaten Kudus atau di luar Kabupaten Kudus, karena di Kabupaten Kudus sendiri banyak industri besar yang bisa membantu untuk memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan industri konveksi dan bordir Desa Padurenan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Anoraga, Pandji dan Djoko

Sudantoko. (2002). *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. (2010).

*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell. John W. (2009). *Research*

*Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Handoko, T. Hani. (2011).

*Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Herlambang, Susatyo. (2013).

*Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Herujito, M. Yayat. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.

Lexy J. Moleong. (2007).

*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moleong. (2009).

*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja

Rosdakarya

Mardikanto, Totok dan Soebiato.

(2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, R & Randy, R. (2007).

*Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori*

*Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta

Syafri, Wirman. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Tambunan, Tulus. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Usman, Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **Internet**

<http://kecgebog.co.id/p/sekilas-desa-padurenan.html>. Diakses pada

tanggal 13 September 2017, pukul 20.26 WIB.

### **Jurnal**

Rohmah, Fathatur Rohmah. (2015). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Olahan Mangga (Studi pada Sentra Olahan Mangga Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo)*. Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 3, No. 12

Firmansyah, Robby. (2014). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)*. Universitas Brawijaya: Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 2, No. 1

Rifa'I, Bachtiar Rifa'I. (2013). *Efektivitas Pemberdayaan*

*Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.* Universitas Airlangga. Vol. 1, No. 1

Purnanto, Cahyo Uji. (2014). *Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang.* Universitas Diponegoro: Journal of Public Policy and Management Review. Vol.2, No.3

Kurniawan, Duwi. (2014). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) dalam Penanggulangan Kemiskinan.* Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Vol. 2, No. 2